



Fiscal Transparency in Local Governments: Trends and Determinants: A Systematic Literature Review

Biizni Putri Bengi^{1*}, Riantari Maharani², Rizki Putri Nurita Fonna³, Dinaroe Dinaroe⁴

^{1,2,3,4} Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 23111, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: August 20, 2025
Revised: October 08, 2025
Available online: October 28, 2025

KEYWORDS

Local Government, Fiscal Transparency, Public Financial Disclosure, Accountability, Public Governance, Systematic Literature Review.

CORRESPONDENCE

E-mail: biizniputribengi@usk.ac.id

A B S T R A C T

This study aims to analyze the development, determinants, and challenges of local government fiscal transparency during the period 2015–2025. A Systematic Literature Review (SLR) was conducted using the PRISMA protocol, with 147 articles initially identified from the Scopus database and 20 articles meeting the inclusion criteria for detailed analysis. The results indicate that studies on local government fiscal transparency remain fragmented and unevenly distributed, with the majority conducted in developed countries, while evidence from developing countries is still limited. Eight main determinant groups were identified, namely local government size and characteristics, economic and fiscal conditions, political and institutional factors, public participation and oversight, performance and social conditions, technology and access to information, situational and crisis contexts, and spatial and external factors. Furthermore, the findings show that fiscal transparency is frequently implemented more in form than in substance, since disclosed information is not always presented in an accessible, comprehensive, and understandable way for the public.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Indonesia, 2003), pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi sendiri merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks pemerintahan, transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi penting secara proaktif kepada publik, sehingga masyarakat dapat memahami, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi tersebut tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan (Ridwan et al., 2024).

Pada level daerah, transparansi fiskal memiliki urgensi yang semakin tinggi. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah berimplikasi langsung terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Misalnya, laporan keuangan daerah yang dapat diakses secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk memantau alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan legitimasi pemerintah daerah. Namun, implementasi prinsip transparansi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kualitas sistem informasi keuangan yang belum memadai, kompleksitas regulasi, serta

rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan informasi keuangan yang tersedia.

Secara global, urgensi transparansi fiskal juga ditekankan oleh berbagai lembaga internasional seperti IMF, OECD, dan World Bank yang menilai transparansi sebagai kunci untuk mengurangi asimetri informasi, meningkatkan akuntabilitas, menjaga stabilitas makroekonomi, dan memperkuat kredibilitas fiskal yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan investor. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat transparansi fiskal yang tinggi dapat mencegah praktik korupsi, meningkatkan kualitas belanja publik, serta memperkuat disiplin fiskal. Meskipun demikian, penelitian terkait transparansi fiskal masih terfragmentasi. Sebagian besar studi menyoroti faktor-faktor determinan transparansi fiskal, sementara sebagian lainnya berfokus pada dampaknya terhadap kinerja keuangan atau kepercayaan publik. Temuan yang kontekstual dan parsial ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian sistematis yang mampu mengintegrasikan hasil penelitian sebelumnya.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui penerapan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode ini dipilih untuk memberikan sintesis yang lebih komprehensif mengenai perkembangan literatur terkait transparansi fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini secara khusus memetakan tren publikasi selama satu dekade terakhir (2015–2025), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi transparansi fiskal, serta mengungkap kesenjangan penelitian (*research gaps*) yang masih ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih integratif mengenai kondisi

riset global sekaligus menawarkan arah penelitian di masa depan.

Selain itu, hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah. Temuan mengenai faktor determinan transparansi fiskal dapat dijadikan dasar untuk memperkuat kebijakan tata kelola fiskal, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, mengoptimalkan sistem informasi keuangan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, transparansi fiskal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat akuntabilitas publik, kepercayaan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

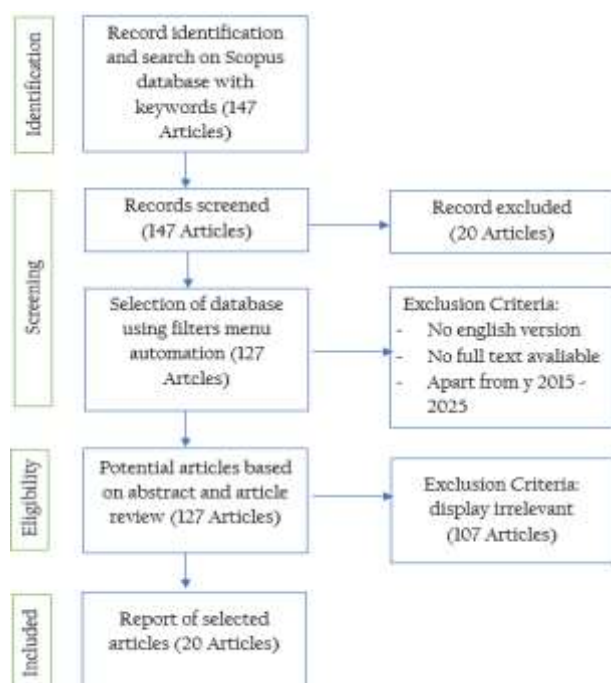
Melalui penelitian ini, diharapkan akan menjawab pertanyaan berikut:

RQ1: Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat transparansi fiskal di pemerintah daerah?

RQ2: Bagaimana tren perkembangan penelitian tentang local government fiscal transparency dalam 10 tahun terakhir?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis bukti ilmiah yang relevan secara transparan dan replikasi dapat dilakukan. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap tren penelitian, faktor determinan, serta kesenjangan dalam kajian transparansi fiskal pemerintah daerah. Proses pelaksanaan SLR mengacu pada Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) dan prinsip yang dijelaskan oleh (Lame, 2019).



Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

Tahapan SLR dilakukan secara berurutan melalui empat tahap utama, yaitu identifikasi, penyaringan (*screening*), kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*inclusion*), sebagaimana digambarkan dalam PRISMA Flow Diagram pada gambar 1.

1. Identifikasi

Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan aplikasi Publish or Perish (PoP) yang terhubung dengan basis data Google Scholar. PoP dipilih karena mampu mengekstraksi data bibliografis secara lengkap, termasuk judul, penulis, tahun publikasi, serta sitasi, sehingga memudahkan proses pengolahan data literatur. Kata kunci pencarian disusun dengan memanfaatkan boolean operator (AND, OR), mencakup istilah seperti *fiscal transparency*, *local government*, dan *accountability*. Untuk menjaga relevansi dengan perkembangan terkini, pencarian difokuskan pada artikel yang dipublikasikan dalam periode 2015–2025. Dari proses ini diperoleh 147 dokumen awal.

2. Screening

Seluruh dokumen hasil pencarian diperiksa berdasarkan judul dan abstrak untuk menilai kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, sebanyak 20 dokumen dieliminasi karena tidak relevan dengan isu transparansi fiskal atau teridentifikasi sebagai duplikasi, sehingga tersisa 127 dokumen.

3. Seleksi Basis Data

Penyaringan lanjutan dilakukan dengan penerapan tiga kriteria eksklusi, yaitu: (a) artikel tidak tersedia dalam bahasa Inggris, (b) tidak tersedia akses ke teks penuh (*full text*), dan (c) artikel terbit di luar periode 2015–2025. Setelah penerapan filter tersebut, jumlah dokumen yang memenuhi persyaratan awal tetap 127 artikel, karena seluruh dokumen hasil penyaringan awal masih sesuai dengan kriteria dasar.

4. Eligibility

Dokumen yang lolos tahap penyaringan kemudian ditelaah lebih lanjut melalui pembacaan abstrak dan isi artikel. Proses ini bertujuan memastikan bahwa studi yang dipilih relevan dengan topik transparansi fiskal pada pemerintah daerah. Dari telaah mendalam, sebanyak 107 artikel dieliminasi karena membahas isu di luar lingkup, misalnya fokus pada sektor privat, analisis kebijakan fiskal makro, atau metodologi yang berbeda dari fokus penelitian.

5. Inclusion

Setelah melalui proses seleksi, diperoleh 20 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi. Artikel-artikel ini kemudian dijadikan dasar analisis dalam penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi transparansi fiskal, mengungkap tren penelitian terkini, serta menyusun rekomendasi kebijakan.

Prosedur Analisis

Artikel yang lolos seleksi diekstraksi menggunakan tabel koding yang mencatat informasi utama, seperti judul, penulis, tahun publikasi, metode penelitian, variabel yang diteliti, serta temuan utama. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pengelompokan literatur berdasarkan tema-tema utama, kecenderungan metodologi, serta variabel determinan transparansi fiskal. Sintesis hasil analisis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Dokumen Tahunan



Gambar 2. Grafik Distribusi Dokumen Tahunan

Berdasarkan gambar 2, pada awal periode, tahun 2015 tidak tercatat publikasi. Jumlah publikasi mulai terlihat pada 2016 dengan dua publikasi, kemudian menurun menjadi satu publikasi pada 2017. Tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan menjadi tiga publikasi, namun kembali turun ke satu publikasi pada 2019. Tahun 2020 terjadi kenaikan ke dua publikasi, diikuti penurunan kembali menjadi satu publikasi pada 2022. Setelah itu, tren cenderung meningkat, dengan tiga publikasi pada 2023 dan 2024, hingga mencapai puncaknya pada 2025 dengan empat publikasi. Secara keseluruhan, grafik memperlihatkan fluktuasi jumlah publikasi setiap tahun, tetapi dengan kecenderungan meningkat pada periode akhir. Tren pada gambar 2 menunjukkan bahwa meskipun perkembangan penelitian mengenai transparansi fiskal pemerintah daerah belum stabil dan masih mengalami fluktuasi, minat peneliti terhadap topik ini semakin menguat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan jumlah publikasi pada 2023–2025 dapat mencerminkan bertambahnya perhatian akademisi terhadap isu transparansi, terutama sebagai respon atas dinamika regulasi, tuntutan akuntabilitas publik, dan perkembangan teknologi informasi yang mendorong keterbukaan fiskal pemerintah. Dengan demikian, tren ini mengindikasikan adanya peluang berkembangnya kajian yang lebih komprehensif di masa depan.

Negara Paling Banyak Dikutip

Tabel 1. Negara Paling Banyak Dikutip

Rank	Negara	Total Kutipan
1	Amerika Serikat	90
2	UK	23
3	Slovenia	18
4	Spanyol	12
5	Singapura	5
6	Kroasia	3
7	Brazil	2
8	Republik Ceko	1
9	Australia	0
10	Belanda	0
11	Chile	0

Berdasarkan tabel 1 di atas, Amerika Serikat berada di posisi teratas dengan jumlah kutipan yang sangat dominan, yaitu 90 kutipan. Di peringkat kedua, Inggris (UK) mencatat 23 kutipan, diikuti Slovenia dengan 18 kutipan, dan Spanyol dengan 12 kutipan. Selanjutnya, Singapura memperoleh 5 kutipan, Kroasia 3 kutipan, Brazil 2 kutipan, serta Republik Ceko 1 kutipan. Tiga negara terakhir—Australia, Belanda, dan Chile—tidak memiliki kutipan sama sekali. Secara umum, terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, menunjukkan dominasi yang kuat dalam jumlah kutipan yang diterima.

Artikel Paling Banyak Dikutip

Tabel 2. Artikel Paling Banyak Dikutip

Rank	Judul	Author	Cite
1	Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence From Municipality-Level Panel Data	F. Tejedó-Romero	69
2	The determinants of fiscal transparency in Chinese city-level governments	S. Sun	21
3	Developments in transparency in the spanish municipalities: An analytical revision of the last research	M. Mendieta	17
4	Determinants of open data disclosure and accountability in Spanish regional governments	J. García-García	12
5	Fiscal Decentralization, Budgetary Transparency, and Local Government Size in China	S. Zhang	11
6	Is transparency spatially determined? An empirical test for Italian municipalities	E. Galli	9
7	Fiscal Transparency and Foreign Direct Investment in China	J.T. Huang	5
8	Political stubbornness and online local budget transparency in croatia	K. Ott	3
9	The level of fiscal transparency and accountability of budget users - Evidence from Macedonia	B. Trenovski	2
10	Transparency and its drivers. A study of the Colombian experience (2012-2016)	V.M. Castañeda-Rodríguez	2
11	Can better financial conditions lead to more fiscal transparency? Evidence from municipalities in California	H. Kang	1
12	Exploring the causality between transparency and public finance indicators among Spanish local governments to improve competitiveness	J. Cifuentes-Faura	1
13	The Determinants of Fiscal Transparency in Vietnamese Local Governments	H.T. Thuy	1

14	Accessibility of State Financial Information: Analysis of State MD&A Size, Readability, and Timeliness	W. Yusuf	0
15	Determinants of Access to Information Requests: Analysis of the Municipalities of the Los Ríos Region, Chile	J. Hernández-Z-Bonivento	0
16	Digital budget supervision governance and local government fiscal transparency	P. Jin	0
17	Does National Auditing Improve Local Fiscal Transparency? Evidence From China	Z. Chen	0
18	Government accounting reform, fiscal transparency, and local government debts: Evidence from China	X. Wan	0
19	Transparency in tender waivers in local governments during emergency situations	A. Precinotto	0
20	Truth and illusion: can a transparency reform contribute to accountable taxing behaviour?	Y. Kim	0

Artikel *Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence from Municipality-Level Panel Data* oleh *F. Tejedo-Romero* menempati peringkat pertama dengan 69 kutipan, jauh melampaui artikel lainnya. Peringkat kedua ditempati *S. Sun* dengan artikel *The determinants of fiscal transparency in Chinese city-level governments* yang memperoleh 21 kutipan, disusul oleh *M. Mendieta* di posisi ketiga dengan 17 kutipan. Beberapa artikel lain dengan jumlah kutipan menengah antara lain karya *J. García-García* (12 kutipan), *S. Zhang* (11 kutipan), dan *E. Galli* (9 kutipan). Artikel dengan jumlah kutipan rendah mencakup *J.T. Huang* (5 kutipan), *K. Ott* (3 kutipan), *B. Trenovski* (2 kutipan), serta *V.M. Castañeda-Rodríguez* (2 kutipan). Sisanya, sebelas artikel, termasuk karya *W. Yusuf*, *J. Hernández-Bonivento*, *P. Jin*, *Z. Chen*, *X. Wan*, *A. Precinotto*, dan *Y. Kim*, belum memperoleh kutipan sama sekali.

Secara umum, data ini menunjukkan adanya konsentrasi kutipan yang tinggi pada segelintir artikel, sementara sebagian besar publikasi masih memiliki pengaruh sitasi yang rendah di bidangnya.

Variabel yang Mempengaruhi Transparansi Fiskal pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelaahan secara sistematis terhadap artikel yang relevan, diperoleh berbagai variabel yang memengaruhi tingkat transparansi fiskal pada pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut muncul dari beragam konteks penelitian, yang mencakup ukuran dan karakteristik pemerintah daerah, kondisi ekonomi dan fiskal, faktor politik dan kelembagaan, partisipasi publik dan pengawasan, kinerja & kondisi sosial, faktor teknologi dan akses informasi, konteks situasional dan krisis, dan faktor spasial dan eksternal. Setiap studi yang dianalisis memberikan perspektif unik terkait variabel yang berperan dalam mendorong atau menghambat transparansi fiskal pemerintah daerah. Ringkasan temuan dari berbagai penelitian tersebut disajikan dalam Tabel 3 berikut, yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi

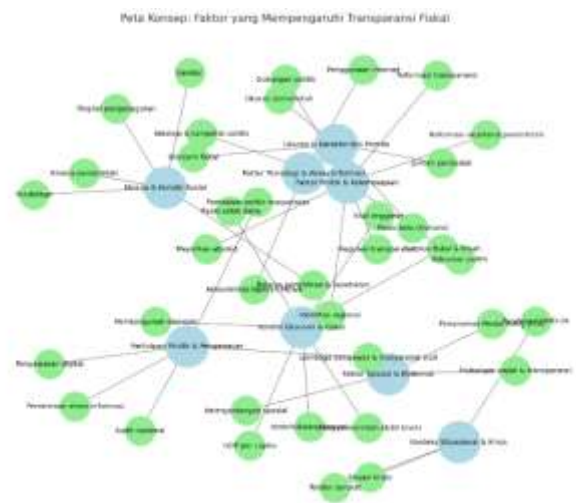
fiskal pada pemerintah daerah, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai determinan transparansi fiskal pemerintah daerah.

Tabel 3. Variabel yang Memengaruhi Transparansi Fiskal Pada Pemerintah Daerah

No	Title	Faktor yang memengaruhi
1	Fiscal Decentralization, Budgetary Transparency, and Local Government Size in China (Shujian Zhang, 2016)	Ukuran Pemerintah
2	The level of fiscal transparency and accountability of budget users - Evidence from Macedonia (Trenovski et al., 2016)	Total budget
3	Developments in transparency in the spanish municipalities: An analytical revision of the last research (Manuel Villoria Mendieta & Ángel Iglesias Alonso, 2017)	Kinerja
4	Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence From Municipality-Level Panel Data (Tejedo-Romero & de Araujo, 2015)	Tingkat Pengangguran, gender, partisipasi politik, dan kekuatan politik
5	Determinants of open data disclosure and accountability in Spanish regional governments (García-García & Curto-Rodríguez, 2018)	- Mayoritas absolut - Kekuatan politik yang tinggi - Regulasi transparansi yang ada - Daya saing ekonomi - Belanja anggaran untuk pendidikan dan kesehatan - Ciri khas identitas regional
6	Fiscal Transparency and Foreign Direct Investment in China (Huang & Chang, 2018)	- Penanam Modal Asing/PMA
7	Political stubbornness and online local budget transparency in croatia (Ott et al., 2020)	faktor politik (ideologi politik dan kompetisi politik)
8	Is transparency spatially determined? An empirical test for Italian municipalities (Galli et al., 2020)	ketergantungan spasial
9	The determinants of fiscal transparency in Chinese city-level governments (Sun & Andrews, 2020)	- tingkat pembangunan ekonomi - keterbukaan ekonomi - ketergantungan pada transfer pembayaran - ukuran pemerintah daerah - tingkat penggunaan internet yang tinggi - posisi kota yang lebih tinggi dalam hierarki administrasi Tiongkok.

10	Can better financial conditions lead to more fiscal transparency? Evidence from municipalities in California (Kang & Chen, 2022)	- Tingkat utang (debt level) - Rasio saldo dana (fund balance ratio)	19	Government accounting reform, fiscal transparency, and local government debts: Evidence from China (Wan et al., 2025)	Government Accounting Reform (Reformasi Akuntansi Pemerintah)
11	Accessibility of State Financial Information: Analysis of State MD&A Size, Readability, and Timeliness (Yusuf et al., 2023)	- Faktor internal organisasi	20	Truth and illusion: can a transparency reform contribute to accountable taxing behaviour? (Kim & Sorensen, 2025)	Reformasi transparansi tahun 2003 di North Carolina → mewajibkan pemerintah daerah melaporkan secara terbuka deviasi dari revenue-neutral tax rate. Reformasi ini mengurangi fiscal illusion dan meningkatkan akuntabilitas perilaku pemungutan pajak.
12	The Determinants of Fiscal Transparency in Vietnamese Local Governments (Thuy & Lim, 2023)	- belanja pemerintah daerah - pajak - jumlah penduduk - surplus fiskal - hibah antar-pemerintah.			
13	Transparency in tender waivers in local governments during emergency situations (Precinotto et al., 2023)	- faktor politik - kapasitas pejabat - relaksasi aturan pengadaan			
14	Determinants of Access to Information Requests: Analysis of the Municipalities of the Los Ríos Region, Chile (Moller et al., 2025)	Kepatuhan terhadap persyaratan transparansi aktif → kotamadya yang lebih patuh cenderung menerima lebih banyak permintaan informasi. Partisipasi politik warga → tingkat keterlibatan politik masyarakat berhubungan dengan jumlah permintaan informasi. Otonomi fiskal kotamadya → kotamadya dengan otonomi fiskal lebih tinggi cenderung menerima lebih banyak permintaan informasi.			
15	Exploring the causality between transparency and public finance indicators among Spanish local governments to improve competitiveness (Cifuentes-Faura et al., 2024)	Ada hubungan timbal balik antara pajak langsung dan indeks transparansi			
16	Transparency and its drivers. A study of the Colombian experience (2012-2016) (Castañeda-Rodriguez & Leon-Silva, 2024)	Fiscal autonomy (otonomi fiskal) Education (pendidikan) GDP per capita (produk domestik bruto per kapita) Population size (jumlah penduduk) Political participation (partisipasi politik)			
17	Digital budget supervision governance and local government fiscal transparency (Jin & Wang, 2025)	Digital budget supervision governance			
18	Does National Auditing Improve Local Fiscal Transparency? Evidence From China (Chen & Hu, 2025)	Audit nasional memiliki peran strategis dalam memperkuat dan meningkatkan transparansi fiskal.			

Berdasarkan tabel di atas, variabel yang memengaruhi transparansi fiskal pada pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok variabel besar, yaitu Ukuran & karakteristik pemerintah daerah, Kondisi ekonomi & fiskal, Faktor politik & kelembagaan, Partisipasi publik & pengawasan, Kinerja & kondisi sosial, Faktor teknologi & akses informasi, Konteks situasional & krisis, dan Faktor spasial & eksternal. Pengelompokan variabel tersebut menunjukkan bahwa transparansi fiskal pada pemerintah daerah merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh beragam aspek, mulai dari faktor internal kelembagaan hingga kondisi eksternal yang bersifat situasional. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antarvariabel tersebut, berikut disajikan peta konsep yang memvisualisasikan keterkaitan setiap kelompok faktor dalam membentuk tingkat transparansi fiskal pemerintah daerah.



Gambar 2. Peta Konsep Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Fiskal

Tren Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Transparansi

Analisis terhadap tren faktor-faktor yang memengaruhi tingkat transparansi pada pemerintah daerah dibagi ke dalam beberapa periode waktu sebagaimana dijelaskan dalam poin – poin di bawah ini.

1. Awal periode (2015–2018): fokus utama penelitian yang dilakukan adalah pada faktor ekonomi dasar (ukuran

- pemerintah, anggaran, belanja) dan variabel politik (partisipasi politik, kekuatan politik).
2. Periode menengah (2019–2022): muncul variabel keuangan lebih spesifik (utang, rasio saldo dana), keterbukaan ekonomi, serta faktor spasial.
 3. Periode terbaru (2023–2025): penelitian bergerak ke arah institusionalisasi transparansi (reformasi akuntansi, audit nasional, regulasi transparansi, digital governance) dan partisipasi publik (akses informasi, permintaan informasi warga).
 4. Kemungkinan arah masa depan penelitian kemungkinan akan semakin menekankan peran teknologi digital, reformasi akuntansi, dan keterlibatan publik sebagai penguat transparansi fiskal.

Diskusi

Hasil telaah dari 20 artikel yang dikaji menunjukkan bahwa transparansi fiskal pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh satu variabel tunggal, melainkan oleh beragam faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor tersebut dapat dipetakan ke dalam delapan kelompok besar, yaitu: ukuran & karakteristik pemerintah daerah, kondisi ekonomi & fiskal, faktor politik & kelembagaan, partisipasi publik & pengawasan, kinerja & kondisi sosial, faktor teknologi & akses informasi, konteks situasional & krisis, serta faktor spasial & eksternal.

Pertama, faktor ukuran dan karakteristik pemerintah daerah berperan signifikan. Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar, jumlah penduduk lebih tinggi, serta posisi administratif yang lebih penting dalam hierarki pemerintahan cenderung menghadapi tuntutan transparansi yang lebih besar. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya pengelolaan anggaran yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Selain itu, tingkat otonomi fiskal juga berpengaruh, karena daerah dengan kewenangan fiskal yang lebih besar memiliki insentif dan tekanan lebih tinggi untuk membuka informasi keuangan kepada publik.

Kedua, dari sisi kondisi ekonomi dan fiskal, transparansi dipengaruhi oleh total anggaran, tingkat pembangunan ekonomi, keterbukaan ekonomi, hingga kapasitas fiskal pemerintah daerah. Daerah dengan kondisi fiskal yang sehat, tingkat utang yang terkendali, dan rasio saldo dana yang stabil lebih terdorong untuk bersikap transparan. Sebaliknya, daerah dengan beban utang tinggi justru seringkali meningkatkan transparansi fiskal sebagai strategi untuk memperoleh kepercayaan publik dan investor. Variabel seperti surplus fiskal, hibah antar-pemerintah, serta GDP per capita juga berhubungan erat dengan praktik keterbukaan fiskal.

Ketiga, faktor politik dan kelembagaan menjadi penentu penting dalam literatur. Penelitian menunjukkan bahwa kekuatan politik, mayoritas absolut di parlemen lokal, serta kompetisi politik dapat memperkuat atau justru melemahkan transparansi. Daerah yang memiliki regulasi transparansi yang jelas cenderung lebih akuntabel, sementara identitas regional juga berpengaruh, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial budaya yang kuat. Reformasi kelembagaan seperti reformasi akuntansi pemerintah dan reformasi transparansi fiskal terbukti efektif dalam menciptakan standar akuntabilitas yang lebih konsisten.

Keempat, partisipasi publik dan pengawasan merupakan salah satu determinan utama transparansi fiskal. Tingkat partisipasi politik masyarakat berhubungan positif dengan jumlah permintaan informasi publik, sehingga semakin tinggi

keterlibatan masyarakat, semakin terbuka pula pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan digital seperti penerapan e-budgeting, audit nasional, serta peran lembaga pengawas dan masyarakat sipil memperkuat transparansi dengan menekan peluang penyalahgunaan anggaran.

Kelima, faktor kinerja dan kondisi sosial turut memengaruhi transparansi. Penelitian menemukan bahwa kinerja pemerintah, tingkat pengangguran, peran gender, belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta tingkat pendidikan masyarakat memiliki keterkaitan dengan keterbukaan fiskal. Daerah dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik biasanya lebih kritis dalam menuntut transparansi, sehingga pemerintah terdorong untuk lebih akuntabel.

Keenam, perkembangan teknologi dan akses informasi juga menjadi faktor penting. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat penggunaan internet tinggi serta laporan keuangan yang mudah diakses (readable, timely, dan lengkap) menunjukkan praktik transparansi yang lebih baik. Teknologi digital berperan ganda: sebagai alat publikasi dan juga sebagai sarana kontrol sosial dari masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ketujuh, konteks situasional dan krisis juga berpengaruh signifikan. Misalnya, pada masa krisis ekonomi, pandemi COVID-19, atau kondisi darurat tender pengadaan, kebutuhan akan transparansi semakin tinggi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa justru pada masa-masa tersebut transparansi sering menurun karena adanya relaksasi regulasi atau lemahnya pengawasan. Padahal, kondisi krisis semestinya menjadi momentum untuk meningkatkan keterbukaan demi mencegah penyalahgunaan anggaran publik.

Kedelapan, faktor spasial dan eksternal memperlihatkan bahwa transparansi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Penelitian di Italia menunjukkan adanya ketergantungan spasial, yaitu tingkat transparansi suatu pemerintah daerah dipengaruhi oleh praktik transparansi di daerah tetangganya. Selain itu, faktor eksternal seperti penanaman modal asing (FDI) juga memainkan peran, karena investor asing menuntut kepastian dan keterbukaan dalam tata kelola keuangan publik. Lebih lanjut, terdapat pula bukti hubungan timbal balik antara pajak langsung dan transparansi, di mana sistem perpajakan yang lebih akuntabel meningkatkan transparansi fiskal, dan sebaliknya, transparansi yang lebih tinggi mendorong kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, peta konsep ini menunjukkan bahwa transparansi fiskal bersifat multidimensional, interaktif, dan kontekstual. Faktor internal seperti ukuran pemerintah, kondisi fiskal, dan kapasitas kelembagaan harus dipandang berdampingan dengan faktor eksternal seperti partisipasi publik, pengawasan masyarakat sipil, pengaruh investor asing, serta keterkaitan spasial antar-daerah. Dengan demikian, strategi peningkatan transparansi fiskal tidak dapat dilakukan hanya melalui reformasi akuntansi atau regulasi, tetapi membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, parlemen lokal, masyarakat, hingga aktor global.

Hasil telaah atas 20 artikel juga menunjukkan bahwa transparansi fiskal pemerintah daerah merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berinteraksi. Delapan kelompok determinan utama dapat diidentifikasi, yaitu ukuran dan karakteristik pemerintah

daerah, kondisi ekonomi dan fiskal, politik dan kelembagaan, partisipasi publik dan pengawasan, kinerja dan kondisi sosial, teknologi dan akses informasi, konteks situasional seperti krisis, serta faktor spasial dan eksternal (Zhang, 2016; Pina et al., 2020). Temuan ini menegaskan bahwa transparansi tidak lahir dari satu variabel tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal dalam konteks institusional tertentu.

Perbandingan lintas negara memperlihatkan pola berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju seperti Spanyol, Italia, dan Amerika Serikat, transparansi umumnya ditopang oleh kapasitas fiskal yang kuat (Kang & Chen, 2022), reformasi akuntansi dan tata kelola yang mapan (Wan et al., 2025; Kim & Sorensen, 2025), serta mekanisme pengawasan formal seperti audit nasional (Chen & Hu, 2025) dan undang-undang kebebasan informasi (Piotrowski, 2007). Transparansi di sini bersifat preventif, terlembaga, dan berfungsi menjaga disiplin fiskal.

Sebaliknya, di negara berkembang seperti Tiongkok, Vietnam, Kolombia, dan Makedonia, transparansi sering bersifat reaktif. Daerah dengan defisit atau utang tinggi justru meningkatkan keterbukaan untuk memperoleh kepercayaan publik dan investor (Huang & Chang, 2018; Gandía & Archidona, 2008). Faktor politik memainkan peran dominan: mayoritas absolut dalam parlemen lokal dan ideologi politik tertentu dapat menurunkan transparansi (García-García & Curto-Rodríguez, 2018; Ott et al., 2020). Partisipasi publik lebih banyak dimediasi oleh media dan masyarakat sipil, namun sering terbatas oleh literasi dan akses data (Kayser & Lindstädt, 2015). Dalam konteks krisis, seperti pandemi COVID-19, transparansi justru cenderung menurun di negara berkembang karena relaksasi regulasi (Precinotto et al., 2023; Cucciniello et al., 2017), berbeda dengan negara maju yang mampu menjaga keterbukaan melalui *emergency dashboards* (Berliner & Erlich, 2015).

Selain memberikan pemetaan faktor determinan transparansi fiskal, hasil telaah ini juga memiliki implikasi konseptual yang signifikan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, temuan penelitian ini diposisikan dalam tiga kerangka teoritis utama yang banyak digunakan dalam literatur, yaitu Teori Agensi dan Teori Legitimasi, dalam perspektif Teori Agensi, transparansi fiskal dipahami sebagai mekanisme pengurangan *agency loss*—ketimpangan informasi antara prinsipal dalam hal ini adalah warga negara sebagai pembayar pajak dan agen dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Studi terbaru menekankan peran kapasitas kelembagaan dan digital sebagai faktor moderator. Penelitian oleh (Jin & Wang, 2025) menunjukkan bahwa digital budget supervision governance secara signifikan meningkatkan transparansi fiskal daerah dengan mekanisme yang mengurangi intervensi pemerintah dan diperkuat di wilayah dengan tingkat *marketization* lebih tinggi. Temuan ini menyiratkan bahwa meskipun transparansi menjadi alat, efektivitasnya sangat bergantung pada kerangka kelembagaan yang memungkinkan akses informasi terbuka secara berkelanjutan. Dari perspektif teori legitimasi, transparansi dipakai sebagai strategi untuk memperoleh atau mempertahankan penerimaan sosial. Dalam konteks Indonesia, riset oleh (Setiawati & Utomo, 2024) memperlihatkan bahwa tekanan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah, sehingga transparansi dapat dipahami sebagai respons adaptif terhadap

tekanan eksternal, bukan selalu refleksi kelembagaan yang sudah mapan. Hal ini konsisten dengan gagasan bahwa di berbagai konteks, transparansi bersifat kontingen lebih cenderung reaktif untuk mendapatkan legitimasi daripada preventif dan melembaga.

Implikasi praktis bagi pemerintah daerah di Indonesia adalah transparansi fiskal tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan regulasi administratif, melainkan harus diarahkan pada keterbukaan yang substantif. Data anggaran perlu disajikan secara tepat waktu, dapat dipahami oleh masyarakat, serta dalam format *machine-readable* yang memungkinkan pengolahan lebih lanjut. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme tindak lanjut audit, menyediakan ringkasan anggaran yang mudah diakses, serta membangun protokol keterbukaan pada masa krisis. Dengan demikian, transparansi fiskal di Indonesia dapat berkembang dari sekadar praktik seremonial menjadi instrumen tata kelola yang memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan disiplin fiskal, serta menumbuhkan kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Literatur review ini menegaskan bahwa transparansi fiskal pemerintah daerah dipengaruhi oleh kombinasi faktor regulasi, kapasitas kelembagaan, perkembangan teknologi informasi, dan partisipasi publik. Transparansi fiskal berperan penting tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi tidak dapat hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga membutuhkan investasi dalam infrastruktur teknologi, penguatan kompetensi aparatur, serta strategi pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan informasi fiskal secara efektif. Implikasi kebijakan yang muncul adalah perlunya sinergi antara aspek hukum, teknis, dan sosial dalam mendorong keterbukaan fiskal di pemerintah daerah.

Perkembangan penelitian mengenai determinan transparansi fiskal menunjukkan pergeseran fokus yang cukup signifikan. Pada periode awal (2015–2018), kajian lebih banyak menyiratkan faktor ekonomi dasar seperti ukuran pemerintah, anggaran, serta belanja, disertai pengaruh variabel politik seperti partisipasi dan kekuatan politik. Memasuki periode menengah (2019–2022), penelitian mulai mengidentifikasi variabel keuangan yang lebih spesifik, termasuk tingkat utang, rasio saldo dana, keterbukaan ekonomi, dan faktor spasial. Pada periode terbaru (2023–2025), arah penelitian bergerak menuju institusionalisasi transparansi melalui reformasi akuntansi, peran audit nasional, regulasi transparansi, serta tata kelola digital, di samping semakin besarnya peran partisipasi publik melalui akses dan permintaan informasi. Ke depan, penelitian diproyeksikan akan semakin menekankan pentingnya teknologi digital, reformasi akuntansi dan perpajakan, serta keterlibatan publik sebagai faktor kunci penguatan transparansi fiskal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan kajian empiris dengan pendekatan *mixed methods* di negara berkembang guna menangkap konteks lokal yang sering terabaikan dalam literatur global. Penelitian ke depan juga dapat mengeksplorasi efektivitas penerapan teknologi digital dan literasi fiskal publik dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan

kontribusi penting baik bagi pengembangan teori maupun praktik kebijakan fiskal di tingkat daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada rekan sejawat dan peneliti lain atas masukan yang berharga selama proses peninjauan, serta kepada institusi akademik yang telah menyediakan akses ke basis data penelitian. Apresiasi juga diberikan kepada para penelaah dan editor atas saran dan komentar konstruktif yang telah memperkaya kualitas artikel ini.

REFERENSI

- Castañeda-Rodríguez, V. M., & Leon-Silva, J. M. (2024). Transparency and its drivers. A study of the Colombian experience (2012-2016). *Revista de Administracao Publica*, 58(1). <https://doi.org/10.1590/0034-761220230027x>
- Chen, Z., & Hu, M. (2025). Does National Auditing Improve Local Fiscal Transparency? Evidence From China. *International Studies of Economics*, 20(2), 153–161. <https://doi.org/10.1002/ise3.70007>
- Cifuentes-Faura, J., Simionescu, M., & Hudakova, M. (2024). Exploring the causality between transparency and public finance indicators among Spanish local governments to improve competitiveness. *Journal of Competitiveness*, 16(2), 240–261. <https://doi.org/10.7441/joc.2024.02.12>
- Galli, E., Rizzo, I., & Scaglioni, C. (2020). Is transparency spatially determined? An empirical test for Italian municipalities. *Applied Economics*, 52(58), 6372–6385. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1795068>
- García-García, J., & Curto-Rodríguez, R. (2018). Determinants of open data disclosure and accountability in Spanish regional governments. *Reforma y Democracia*, 2018, 163–198.
- HUANG, J.-T., & CHANG, M.-L. (2018). FISCAL TRANSPARENCY AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CHINA. *The Singapore Economic Review*, 63(04), 839–859. <https://doi.org/10.1142/S0217590817420127>
- Jin, P., & Wang, Z. (2025). Digital budget supervision governance and local government fiscal transparency. *International Review of Economics & Finance*, 102, 104306. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104306>
- Kang, H., & Chen, G. (2022). Can better financial conditions lead to more fiscal transparency? Evidence from municipalities in California. *Local Government Studies*, 48(5), 821–841. <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1919634>
- Kim, Y., & Sorensen, L. C. (2025). Truth and illusion: can a transparency reform contribute to accountable taxing behaviour? *Local Government Studies*, 51(4), 673–702. <https://doi.org/10.1080/03003930.2024.2379584>
- Manuel Villoria Mendieta, & Ángel Iglesias Alonso. (2017). Developments In Transparency In The Spanish Municipalities: An Analytical Revision Of The Last Research. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 15(3), 411–432. [https://doi.org/10.4335/15.3.411-432\(2017\)](https://doi.org/10.4335/15.3.411-432(2017))
- Moller, F., Hernández-Bonivento, J., & zamorano, maren. (2025). Factores determinantes de solicitudes de acceso a la información: análisis de las municipalidades de la región de Los Rios, Chile. *Economía y Política*. <https://doi.org/10.15691/07194714.2024.010>
- Ott, K., Mačkić, V., & Bronic, M. (2020). Political Stubbornness and Online Local Budget Transparency in Croatia. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta Au Rijeci*, 37, 553–585. <https://doi.org/10.18045/zbfri.2019.2.553>
- Precinotto, A., Dias, L. N. da S., & Aquino, A. C. B. de. (2023). Transparency in Tender Waivers in Local Governments During Emergency Situations. *Revista Contabilidade & Finanças*, 34(93). <https://doi.org/10.1590/1808-057x20231716.en>
- Ridwan, A., Maharjan, K., & Ulwi, K. (2024). Use of Blockchain for Data Security in E-Government Systems. *Journal of Computer Science Advancements*, 2(6), 406–419. <https://doi.org/10.70177/jscs.v2i6.1624>
- Setiawati, T., & Utomo, D. C. (2024). Pengaruh Tekanan Fiskal, Belanja Modal dan Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah Terhadap Transparansi (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13(4), 1–14. <http://ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Shujian Zhang. (2016). Fiscal Decentralization, Budgetary Transparency, and Local Government Size in China. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(7).
- Sun, S., & Andrews, R. (2020). The determinants of fiscal transparency in Chinese city-level governments. *Local Government Studies*, 46(1), 44–67. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1608828>
- Tejedo-Romero, Francisca, & de Araujo, Joaquim Filipe Ferraz Esteves. (2015). Determinants of Local Governments' Transparency in Times of Crisis: Evidence From Municipality-Level Panel Data. *Administration & Society*, 50(4), 527–554. <https://doi.org/10.1177/0095399715607288>
- Thuy, H. T., & Lim, S. (2023). The Determinants of Fiscal Transparency in Vietnamese Local Governments. *Lex Localis*, 21(2), 297–322. [https://doi.org/10.4335/21.2.297-322\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.2.297-322(2023))
- Trenovski, B., Mangova, I., & Levkov, N. (2016). The level of fiscal transparency and accountability of budget users - evidence from Macedonia. *International Journal of Public Policy*, 12(3–6), 210–242. <https://doi.org/10.1504/IJPP.2016.079740>
- Wan, X., Guo, M., Jiang, P., & Xu, L. (2025). Government accounting reform, fiscal transparency, and local government debts: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 91, 102763. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2025.102763>
- Yusuf, Wie, Jordan, Meagan M, Saitgalina, Marina, & Jones, Peter A. (2023). Accessibility of State Financial Information: Analysis of State MD&A Size, Readability, and Timeliness. *Public Administration Quarterly*, 47(4), 429–455. <https://doi.org/10.37808/paq.47.4.2>